

BAB IV

KESIMPULAN

Akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kasus impor garam Indonesia yang terjadi pada tahun 2011-2013 terdapat berbagai alasan hal tersebut terjadi, impor garam yang dijadikan sebagai sebuah kebijakan oleh pemerintah dalam menutupi kekurangan garam dalam negeri disebabkan karena :

1. Dampak dari dibukanya pintu perdagangan bebas di Indonesia sejak bergabungnya Indonesia dalam berbagai perjanjian dan kesepakatan kerjasama perdagangan bebas baik dalam skala regional maupun internasional. Dengan dibukanya pintu perdagangan bebas ini tentu dapat mempermudah keluar-masuknya suatu barang yang dirasa cukup atau tidak dengan tarif bea masuk yang semakin lama semakin rendah.
2. Ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi permasalahan yang timbul dari industri garam Nasional, seperti keberadaan teknologi yang masih sangat tradisional dengan bergantung pada iklim dan cuaca Indonesia tanpa adanya perhatian yang lebih fokus dari pemerintah untuk memperbaharui dan meningkatkan perindustriannya. Pemerintah menyikapi kekurangan garam baik konsumsi maupun industri mengambil jalan pintas yaitu impor tanpa berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas garam dalam negeri. Dengan meningkatkan infrastruktur seperti menggunakan teknologi yang lebih modern untuk produksi garam bisa

saja mengurangi kuota impor negara, meskipun untuk penggunaan teknologi yang lebih modern diperlukan biaya dan waktu lebih didalamnya. Namun manfaat yang bisa dirasakan akan bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama.

3. Tidak adanya data akurat dari berbagai badan/sumber yang menangani data perindustrian garam baik produksi, konsumsi dan distribusi. Tentu ini mempersulit pemerintah dalam menentukan kebijakan. Ketika data produksi dikurangi dan data konsumsi ditinggikan tentu mendorong pemerintah untuk menutupi kekurangan tersebut dengan adanya impor.
4. Adanya '*permainan*' dalam industri garam Nasional yang dilakukan baik oleh beberapa pihak yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan dan bahkan kemungkinan yang ada '*permainan*' tersebut masih akan tetap berlanjut sebelum adanya tindakan tegas terhadap kebijakan industri garam Indonesia.
5. Jika pemerintah memilih untuk meningkatkan industri garam dalam negeri, akan membutuhkan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tinggi. Sebab, keberadaan industri garam cukup banyak dan sebagian besar diantaranya masih menggunakan cara tradisional. Jika pemerintah hanya meningkatkan sebagian industri garam yang ada di Indonesia tentu akan menimbulkan masalah baru. Namun, apa salahnya pemerintah mencoba secara perlahan dalam pembangunan industri tersebut, sekalipun membutuhkan waktu dan biaya yang lebih, setidaknya Indonesia tidak akan bergantung lagi terhadap impor dari luar negeri.